



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN
KERJA KABINET**

The background of the lower half of the page is a photograph of the Cabinet Secretariat building in Jakarta, Indonesia. The building is a large, modern, white structure with a prominent portico supported by columns. To the left of the building, the Indonesian flag (Garuda Pancasila) is flying on a tall pole. The scene is set against a clear blue sky with some light clouds. The text 'SEKRETARIAT KABINET 2016' is overlaid in red on the bottom part of the image.

**SEKRETARIAT KABINET
2016**

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 perlu disusun Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.

Renstra Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, target dan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam rangka mewujudkan sasaran strategis ke dua Sekretariat Kabinet yaitu peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet dalam kurun waktu 2015-2019.

Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renstra pada Unit Kerja Eselon II dilingkungan kedeputian bidang Dukungan Kerja Kabinet dan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019.

Jakarta, Januari 2016

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,



Yuli Harsono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 disusun sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. LKj ini memberikan gambaran tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015 terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2015 serta analisis atas capaian kinerja tahun 2015 terhadap rencana kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015-2019.

Keberhasilan maupun kegagalan kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet diukur antara lain melalui pelaksanaan survei kepada para peserta sidang kabinet (para Menteri anggota Kabinet dan pejabat Setingkat Menteri, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan para Pejabat lainnya), terkait dengan kepuasan terhadap pengelolaan sidang kabinet (penyelenggaraan dan risalah hasil sidang kabinet). Tingkat kepuasan atas penyelenggaraan dan risalah sidang kabinet melalui survei kepuasan yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember 2015 yang selanjutnya diperbandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya. Survei dilaksanakan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para peserta sidang (para Menteri, Ketua LPND, para pejabat setingkat Menteri serta pejabat tertentu lainnya).

Tabel 1

Perbandingan Target dan Capaian IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2014 dan Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Target	Capaian	Target	Capaian
1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	93,18%	100%	92,17%
2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	85%	94,44%	100%	91,55%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase capaian tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan sidang tahun 2014 sebesar 93,18% dan tahun 2015 sebesar 92,17, terjadi penurunan sebesar 1,01%. Menurunnya capaian ini banyak dipengaruhi oleh beberapa sebab yang diantaranya adalah karena objek pertanyaan yang disampaikan kepada responden berbeda antara tahun 2014 dan tahun 2015. Penurunan ini dapat juga dikarenakan beberapa responden yang disurvei pada survei I (periode Januari-Juni 2015) berbeda dengan responden yang disurvei pada survei II (periode Juli-Desember 2015), dan hal ini sangat mempengaruhi hasil survei.

Sedangkan tingkat kepuasan terhadap risalah sidang pada tahun 2014 sebesar 94,44% dan tahun 2015 sebesar 91,55%, terjadi penurunan sebesar 2,89%. Berdasarkan saran atau masukan yang disampaikan peserta sidang melalui kuesioner yang diterima diperoleh kesimpulan bahwa menurunnya tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet bukan disebabkan karena kurang manfaatnya risalah sidang dalam membantu menindaklanjuti arahan Presiden tetapi lebih banyak disebabkan kurang cepatnya peserta sidang kabinet mendapatkan risalah sidang kabinet bahkan ada yang tidak menerima.

Walaupun mengalami penurunan persentase tingkat kepuasan, namun hasil survei yang diperoleh tahun 2015, jika disejajarkan dengan rentang nilai kepuasan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2015-2019, masih termasuk dalam kategori “**sangat baik**” atau **nilai “A”**.

Tabel 2
Rentang Nilai Kepuasan

No.	Rentang Nilai Kepuasan	Kategori	Nilai
1	85% - 100%	Sangat Baik	A
2	70% - <85%	Baik	B
3	55% - <70%	Sedang	C
4	<55%	Kurang Baik	D

Selain itu, keberhasilan maupun kegagalan kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet diukur melalui pelaksanaan survei kepada para peserta sidang kabinet terkait dengan kepuasan terhadap pengelolaan sidang kabinet (penyelenggaraan dan risalah hasil sidang kabinet), juga

diukur melalui terselesaikannya naskah dan penerjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti dan terbinanya pejabat fungsional penerjemah sesuai rencana, serta pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan terhadap penyebarluasan informasi terkait dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan melalui website www.setkab.go.id

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet yaitu "*Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet, penyiapan naskah dan penerjemahan, dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet*", Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkomitmen untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya baik dalam hal penyelenggaraan maupun penyusunan risalah sidang kabinet.

Hal lain yang juga yang harus ditingkatkan dimasa yang akan datang yaitu bidang naskah dan terjemahan serta hubungan kemasyarakatan dan protokol. Adapun upaya-upaya yang akan terus-menerus dilakukan pada tahun 2016, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dengan Kementerian Sekretariat Negara, para Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, para Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya berkaitan dengan waktu dan tempat penyelenggaraan sidang, bahan-bahan sidang, serta sarana lainnya yang dibutuhkan;
2. Meningkatkan kualitas risalah sidang kabinet agar dapat dijadikan dasar dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan perumusan kebijakan serta memastikan bahwa pendistribusian risalah kepada para peserta sidang diterima tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas penyiapan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan, penerjemahan, serta kualitas pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah.
4. Meningkatkan kualitas dan kecepatan dalam penyajian informasi yang terkait dengan kegiatan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan baik informasi Pengantar Presiden maupun hasilnya melalui *website* dan media sosial Sekretariat Kabinet.

Total anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015 setelah revisi sebesar **Rp10.096.902.000,-** (sepuluh miliar sembilan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah **terserap sebesar Rp9.497.279.051,-** (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) atau sebesar **94,12%**.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	1
C. Gambaran aspek strategis (<i>Strategic Issued</i>) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Gambaran umum perencanaan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	5
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.....	6
C. Ikhtisar IKU Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015	8
BABIII CAPAIAN KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015	10
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Kabinet.....	25
B. Langkah-langkah/rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perbandingan Target dan Capaian IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2014 dan Tahun 2015.....	iii
Tabel 2 : Rentang Nilai Kepuasan	iv
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 (sebelum perubahan)	7
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 (perubahan)	7
Tabel 5 : IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.....	9
Tabel 6 : Rentang Nilai Kepuasan	12
Tabel 7 : Target, Realisasi dan Capaian dari Indikator Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015	13
Tabel 8 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2015	14
Tabel 9 : Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 dan Tahun 2015	15
Tabel 10 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2015	17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	2
Gambar 2 : Target dan Realisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan Tahun 2014 dan Tahun 2015	11
Gambar 3 : Photo Pelaksanaan Survei Tahun 2015.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2015 yang disampaikan dalam bentuk LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka kedudukan, tugas dan fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah suatu unit kerja yang dipimpin oleh Deputy yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas

Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal persiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, persiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

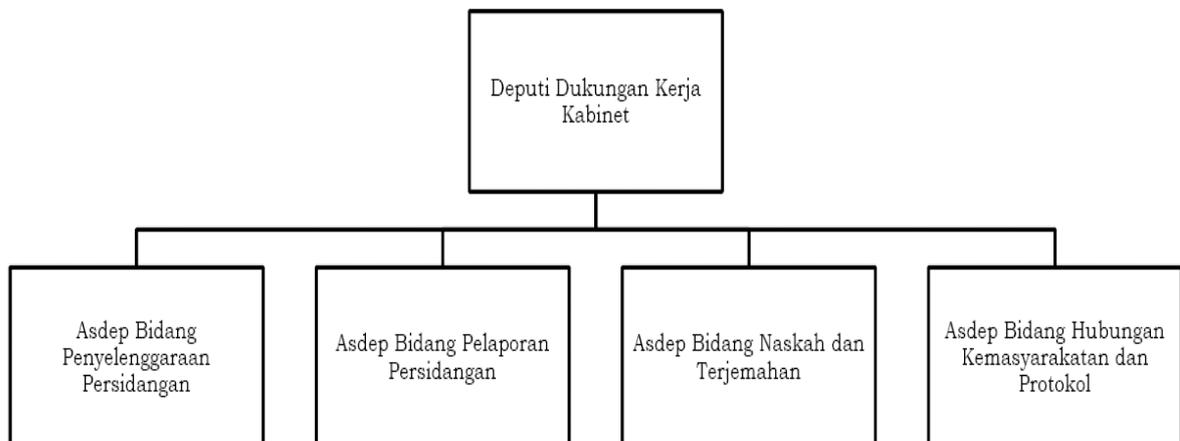
3. Fungsi

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- f. penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretaris Kabinet;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN DUKUNGAN KERJA KABINET



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Deputi Bidang Persidangan Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas Sekretariat Kabinet. Sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasil-hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden.

Adapun jenis kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau pertemuan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sidang Kabinet** merupakan sidang yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh para Menteri dan pejabat terkait lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah-masalah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Sidang Kabinet diadakan secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Presiden. Presiden memberikan arahan dan petunjuk mengenai masalah-masalah yang dibahas setelah mendengarkan penjelasan tanggapan dan masukan dari peserta sidang kabinet. Sidang Kabinet terdiri dari Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet Terbatas.

Sidang Kabinet Paripurna diadakan secara berkala sekali dalam sebulan. Namun dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut. Sidang Kabinet Paripurna membahas masalah-masalah umum dan khusus atau penting yang dihadapi oleh negara.

Sidang Kabinet Terbatas diadakan sekali dalam seminggu atau berdasarkan arahan dan petunjuk Presiden untuk membahas masalah sehari-hari yang dianggap perlu meliputi bidang Polhukam, Perekonomian, Kemaritiman, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta masalah khusus lainnya.

2. **Rapat** terdiri dari Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Rapat yang dipimpin oleh Presiden.

Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diikuti oleh beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan yang akan dibahas (bersifat terbatas). Rapat meliputi juga rapat-rapat lainnya yang dipimpin oleh Presiden guna membahas masalah-masalah tertentu.

Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yaitu rapat yang membahas kebijakan nasional dan dipimpin Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat eselon I terkait, Pejabat Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

3. **Pertemuan** yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi paparan para Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi, *Presidential Lecture*, *Retreat*, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Dalam penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan koordinasi dengan para Kedepatian di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian/Lembaga, instansi terkait lainnya dan/atau pemerintah daerah apabila penyelenggaraannya di daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Deputi Dukungan Kerja Kabinet memiliki aspek strategis terutama dalam melakukan penyelenggaraan dan penyusunan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dimana para stakeholdernya terdiri dari para Menteri, lembaga/instansi pusat maupun pimpinan daerah, dan pejabat tertentu lainnya yang kesemuanya membutuhkan kecepatan dan ketepatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasil sidang berupa risalah sidang.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga memiliki sasaran yang sangat strategis yang dirumuskan dari sasaran strategis ke dua Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, yaitu:

1. **Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; dan**
2. **Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dan penerjemahan.**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih terarah, sistematis, konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dengan mudah.

Renstra Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kajian lingkungan internal dan eksternal serta arah kebijakan dan strategi selama 5 tahun sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya guna mencapai target yang diharapkan, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, yang tertuang dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2015-2019.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Perencanaan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga diartikan sebagai suatu cara pandang ke depan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir yang diimplementasikan ke dalam bentuk kegiatan.

Visi Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempresentasikan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan atau gambaran dari perwujudan kondisi Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet di masa yang akan datang, yaitu **“Menjadi Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet”**.

Misi adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan dan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet maka ditetapkan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yaitu **“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan persidangan kabinet”**.

Misi tersebut dimaksudkan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet mewujudkan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan sidang-sidang kabinet agar penyelenggaraan kabinet terlaksana dengan baik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki tujuan yaitu **“Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas”** dan sasaran strategis terdiri dari:

- 1. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; dan**
- 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dan penerjemahan.**

Adapun langkah-langkah teknis dan konkret yang dilaksanakan, yaitu:

1. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Dukungan pelaporan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.
4. Dukungan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan protokol rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

B. Ringkasan/ikhtisar PK Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Sekretaris Kabinet kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

PK Perubahan Deputy Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2015 sejatinya merupakan perubahan dari PK Deputy Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2015 yang ditetapkan pada awal tahun 2015. Perbandingan PK sebelum perubahan dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Persidangan Kabinet
Tahun 2015 (sebelum perubahan)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet	1. Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet	100%
	2. Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Risalah Sidang Kabinet	100%

Tabel 4
Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Tahun 2015 (setelah perubahan)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,	1. Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet	100%
	2. Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Risalah Sidang	100%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Penyiapan Naskah dan Penerjemahan, pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.	Kabinet	
	3. Persentase naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/ kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%
	4. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina Sesuai Rencana	100%
	5. Persentase Kepuasan Terhadap Penyebarluasan Informasi Terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	80%

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pergeseran yang signifikan pada indikator kinerja dalam mencapai sasaran program/kegiatan yang ditetapkan. Pada PK (sebelum perubahan) hanya terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mempresentasikan IKU dari Asdep Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, sedangkan pada PK Perubahan Tahun 2015 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang mencerminkan/mewakili IKU dari 4 (empat) Keasdepan di lingkungan Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015

Manajemen kinerja merupakan suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu organisasi. Pada implementasinya, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada salah satu aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam mendukung jalannya suatu organisasi. Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan instansi/unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen kinerja yang diterapkan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet diupayakan berjalan sinergis dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang salah satunya terkait dengan aspek akuntabilitas kinerja dengan cara menyempurnakan dan menyelaraskan dokumen-dokumen akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dari mulai dokumen perencanaan sampai dengan pelaporannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yaitu.

Tabel 5
IKU Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015

No.	Sasaran Program	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet dan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	Untuk mengukur kinerja peningkatan kualitas pengelolaan persidangan terkait penyelenggaraan sidang kabinet, penyelesaian risalah sidang kabinet, dan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet
		Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	
		Persentase kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet	
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dan penerjemahan	Persentase penyiapan naskah kepresidenan secara tepat waktu	Untuk mengukur kinerja peningkatan kualitas naskah dan penerjemahan terkait dengan penyiapan naskah kepresidenan dan pejabat fungsional yang dibina
		Persentase pejabat fungsional yang dibina sesuai rencana	

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015

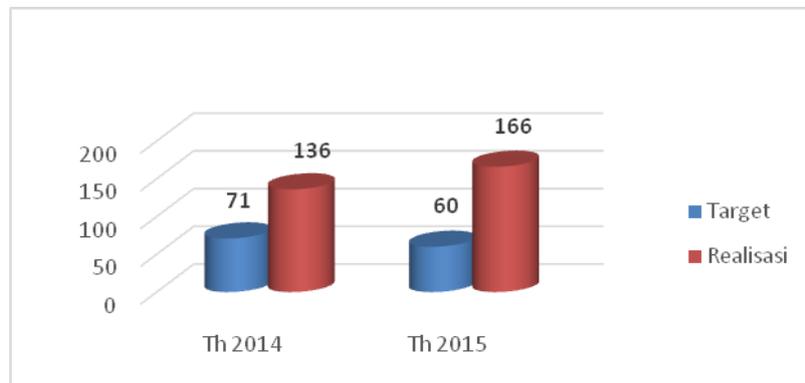
Di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 disebutkan bahwa sasaran program/kegiatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan”. Adapun indikator kinerjanya terdiri dari:

1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet, dengan target 100%.
2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, dengan target 100%.
3. Persentase kualitas naskah dan penerjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%.
4. Persentase pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai rencana, dengan target 100%.
5. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, dengan target 80%.

Untuk memberikan gambaran tentang pencapaian target atas masing-masing indikator kinerja maka perlu diketahui tentang target dan

realisasi penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2
Target dan Realisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan Tahun 2014 dan Tahun 2015



Sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dilakukan berdasarkan instruksi/arahan/petunjuk Presiden, dan/atau permintaan dari masing-masing departemen/instansi terkait untuk penyelesaian masalah-masalah strategis dan isu-isu aktual yang terjadi. Dalam hal inisiatif sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan bukan berdasarkan arahan/petunjuk Presiden, usulan permintaan sidang disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), untuk selanjutnya Seskab menjadwalkan pelaksanaan sidang yang akan dihadiri oleh para menteri/pejabat terkait. Adapun jenis pelaksanaan kegiatan di atas meliputi: Sidang Kabinet Paripurna; Sidang Kabinet Terbatas; Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Retreat, dan Pertemuan lainnya baik yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada tahun 2015 target yang ingin dicapai dari penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan sebanyak 60 penyelenggaraan, namun realisasinya mencapai 166 penyelenggaraan.

Tingginya realisasi dari target disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan sepenuhnya berdasarkan petunjuk Presiden yang sulit diketahui secara pasti seberapa banyak penyelenggaraan sidang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi kendala bagi Deputi Dukungan Kerja Kabinet untuk menentukan target jumlah penyelenggaraan sidang kabinet setiap tahunnya.

Dari kelima indikator kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mewujudkan sasaran terkait peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet, yaitu:

1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet; dan
2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet.

Mekanisme yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan ini yaitu dengan melakukan survei kepada peserta sidang kabinet melalui penyampaian lembar kuesioner kepada para peserta sidang.

Survei tingkat kepuasan tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Survei I (periode Januari – Juni 2015) dilaksanakan pada bulan Juni 2015 dan survei II (periode Juli-Desember 2015) dilaksanakan pada bulan Desember 2015, yang respondennya terdiri para menteri dan peserta sidang kabinet era “Kabinet Kerja”.

Rumus yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum (\text{nilai kepuasan pada pertanyaan}_1 + \text{nilai kepuasan pada pertanyaan}_2 + \dots)}{n} \times 100\%$$

n = jumlah pertanyaan

Hasil perolehan rata-rata persentase tingkat kepuasan selanjutnya dibandingkan dengan rentang nilai kepuasan sehingga diperoleh “**kategori kepuasan**” dan “**nilai kepuasan**”. Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan mengacu pada Rentang Nilai Kepuasan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

Tabel 6
Rentang Nilai Kepuasan

No.	Rentang Nilai Kepuasan	Kategori	Nilai
1	85% - 100%	Sangat Baik	A
2	70% - <85%	Baik	B
3	55% - <70%	Sedang	C
4	<55%	Kurang Baik	D

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7
Target, Realisasi dan Capaian dari Indikator Kinerja
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet	100%	92,17%	92,17%
2	Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Risalah Sidang Kabinet	100%	91,55%	91,55%
3	Persentase naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/ kenegaraan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina Sesuai Rencana	100%	100%	100%
5	Persentase Kepuasan Terhadap Penyebarluasan Informasi Terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	80%	86,11%	107,63%

Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian kinerja atas Indikator Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu indikator keberhasilan Deputi Bidang Persiapan Kabinet dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sidang kabinet.

Oleh karena itu, keseluruhan proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyebarluasan hasil-hasil sidang kabinet perlu ditata dan dikelola dengan baik. Dengan mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan ini, diharapkan akan dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada saat ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan sidang kabinet di waktu yang akan datang. Pengukuran tingkat kepuasan atas penyelenggaraan sidang kabinet dimaksudkan pula untuk mencari dan mengetahui sampai sejauh mana kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet kepada para peserta sidang.

Tabel 8
Rekapitulasi Hasil Jawaban
Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Tahun 2015

No	Pertanyaan	Survei I		Survei II		Rata-2	
		Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	22 (91,67%)	2 (8,33%)	36 (94,74%)	2 (5,26%)	58 (93,55%)	4 (6,45%)
2	Penyajian jamuan dalam sidang kabinet tepat waktu	21 (91,30%)	2 (8,70%)	37 (97,37%)	1 (2,63%)	58 (95,08%)	3 (4,92%)
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas yang membantu saat diskusi berlangsung	21 (91,30%)	2 (8,70%)	33 (89,19%)	4 (10,81%)	54 (90,00%)	6 (10,00%)
4	Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui <i>website.setkab.go.id</i> disajikan dengan cepat	22 (95,65%)	1 (4,35%)	31 (86,11%)	5 (13,89%)	53 (89,93%)	6 (10,17%)
	Jumlah rata-rata	86 (92,48%)	7 (7,52%)	137 (91,85%)	12 (8,16%)	223 (92,17%)	19 (7,83%)

Catatan:

- Jumlah responden survei I sebanyak 24 orang
- Jumlah responden survei II sebanyak 38 orang

Dari data tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa jika dihitung rata-rata persentase jawaban puas (ya) terhadap seluruh pertanyaan terkait dengan tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar 92,48% dan survei II sebesar 91,85%, maka realisasi rata-rata persentase tingkat kepuasan yang diperoleh sebesar 92,17%. Walaupun realisasi tidak mancapai target yang diharapkan yaitu sebesar 100%, namun tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet masuk dalam kategori **“sangat baik”** atau mencapai nilai target yaitu nilai **“A”**. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet selama tahun 2015 telah memenuhi keinginan pada peserta sidang kabinet.

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 terkait dengan kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan sidang kabinet, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 dan Tahun 2015

No.	Uraian IKU	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Target (%)	Capaian	Realisasi (%)	Capaian
-	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	93,18%	100%	92,17%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase kepuasan yang diperoleh tahun 2014 telah mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 1,01%. Menurunnya capaian ini banyak dipengaruhi oleh beberapa sebab yang diantaranya adalah karena objek pertanyaan yang disampaikan kepada responden berbeda antara tahun 2014 dan tahun 2015. Penurunan ini dapat juga dikarenakan beberapa responden yang disurvei pada survei I (periode Januari-Juni 2015) berbeda dengan responden yang disurvei pada survei II (periode Juli-Desember 2015), dan hal ini sangat mempengaruhi hasil survei.

Berdasarkan hasil evaluasi atas survei yang telah dilaksanakan dan saran/masukan dari para peserta sidang, diperoleh kesimpulan bahwa penayangan materi sidang kabinet dan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website setkab.go.id menjadi hal yang banyak mempengaruhi penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2015.

Untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan peserta sidang, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan guna mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada baik teknis maupun non teknis secara berkesinambungan sehingga diharapkan pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua dari Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Sidang Kabinet merupakan sidang yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh para Menteri dan pejabat terkait lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah-masalah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Salah satu hasil sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan kepada para peserta sidang kabinet yaitu sebanyak 159 risalah dari target sebanyak 60 risalah. Tidak seluruh penyelenggaraan sidang kabinet, rapat maupun pertemuan dibuatkan risalah, karena ada beberapa penyelenggaraan sidang yang sifatnya tertutup, sehingga tidak dibuatkan risalah.

Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga masing-masing. Ukuran kinerja yang terkait dengan risalah sidang kabinet yaitu tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet.

Hasil rata-rata jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden pada survei I dan survei II tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rekapitulasi Hasil Jawaban
Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2015

No	Pertanyaan	Survei I		Survei II		Rata-2	
		Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)	Ya (%)	Tidak (%)
-	Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan Presiden	22 (91,67%)	2 (8,33%)	32 (91,43%)	3 (8,57%)	54 (91,55%)	5 (8,45%)

Catatan:

- Jumlah responden survei I sebanyak 24 orang

- Jumlah responden survei II sebanyak 38 orang (3 orang tidak memberikan jawaban)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase jawaban puas (ya) berdasarkan survei I sebesar 91,67% dan survei II sebesar 91,43%, sehingga diperoleh rata-rata persentase tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet sebesar 91,55%.

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 terkait dengan tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap
Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 dan Tahun 2015

No.	Uraian IKU	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Target (%)	Capaian	Target (%)	Capaian
-	Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%	94,44%	100%	91,55%

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kepuasan terhadap risalah tahun 2015 ini mengalami penurunan jika dibandingkan persentase capaian kepuasan terhadap risalah tahun 2014 yaitu sebesar 2,89%.

Berdasarkan saran atau masukan yang disampaikan peserta sidang melalui kuesioner, diperoleh kesimpulan bahwa menurunnya tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet bukan disebabkan karena kurang manfaatnya risalah sidang dalam membantu menindaklanjuti arahan Presiden tetapi lebih banyak disebabkan kurang cepatnya peserta sidang kabinet mendapatkan risalah sidang kabinet bahkan ada yang tidak menerima.

Evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban atas survei penyelenggaraan dan risalah sidang kabinet pada tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan cepat”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 94,74%, dengan rata-rata persentase tingkat kepuasan dari survei tersebut sebesar 93,55%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta sidang kabinet telah merasakan kecepatan penyampaian informasi atas kegiatan sidang yang akan dilaksanakan baik berupa undangan maupun faximile. Mengingat tingkat kecepatan dan keakuratan informasi sidang yang harus disampaikan kepada para peserta sidang kabinet memiliki urgensi yang sangat tinggi, maka diwaktu yang akan datang diperlukan lagi tambahan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan pra sarana yang lebih baik lagi sehingga informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat.

2. “Penyajian jamuan dalam sidang kabinet tepat waktu”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,30% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 97,33%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 95,08%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas jamuan yang disajikan. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu perlunya jamuan yang bervariasi yang tidak membosankan dan tersaji secara tepat waktu.

3. “Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas yang membantu saat diskusi berlangsung”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,30% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 89,11%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 90,00%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas penayangan paparan materi sidang kabinet meskipun ada beberapa yang tidak puas. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar penayang materi sidang dapat lebih efektif yaitu hanya memuat poin-poin pokoknya saja.

4. “Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website.setkab.go.id disajikan dengan cepat”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 95,65% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 86,11%, sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 89,93%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta

sidang kabinet merasa puas atas kecepatan penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui *website*. Hal yang menyebabkan rendahnya penyebaran informasi sidang ini adalah karena ada sebagian peserta sidang kabinet yang belum mengetahui penyebarluasan hasil sidang melalui *Website setkab.go id*. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi *website setkab.go.id* secara terus menerus kepada para peserta sidang.

5. “Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan Presiden”

Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 91,43% sehingga dari dua survei tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 92,17%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet merasa puas atas isi risalah sidang kabinet dan membantu upaya perumusan kebijakan guna menindaklanjuti arahan Presiden. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu agar risalah sidang kabinet sebaiknya disampaikan lebih cepat melalui *e-mail* kepada seluruh peserta sidang. Terkait dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pimpinan untuk mewujudkannya.

Gambar 3.
Photo Pelaksanaan Survei Tahun 2015



3. Persentase penyelesaian naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan

Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja ketiga dari Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pelaksanaan penyelesaian naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan meliputi penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional termasuk di dalamnya pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan.

Penyiapan naskah surat Presiden RI, dapat dibagi terdiri dari naskah-naskah sebagai berikut:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional.
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: **(i)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
3. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat.
4. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri.
5. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, naskah-naskah tersebut, juga memproses pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan yang telah disusun oleh Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Pada tahun 2015 naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan yang telah disusun dan disampaikan serta ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden yaitu sebanyak 39 naskah/dokumen dan kesemuanya telah ditindaklanjuti.

Dengan demikian, maka capaian kinerja berhasil mencapai 100% (sangat baik).

4. Persentase pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai rencana

Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja keempat dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi penerjemahan para PFP. Semua PFP diharapkan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan pembinaan yang ditawarkan oleh Sekretariat Kabinet selaku instansi yang menjalankan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP).

Pada periode Agustus s.d. Desember 2015 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah di Surabaya dan Bogor yang mengangkat tema Peningkatan Kompetensi Penerjemahan Lisan. Kedua kegiatan tersebut diikuti oleh masing-masing 50 (lima puluh) orang sehingga total jumlah PFP yang telah mendapatkan pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis adalah 100 (seratus) orang. Kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi 20 orang PFP terbaik yang memiliki minat dan kemampuan dalam penerjemahan lisan untuk dididik lebih lanjut dalam pelatihan penerjemahan lisan yang lebih intensif pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Bimbingan Teknis Penerjemahan Lisan ini diharapkan dapat menjadi embrio lahirnya para PFP yang mampu melaksanakan tugas penerjemahan lisan secara handal dan profesional di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, terhadap 51 (lima puluh) orang PFP lainnya yang tidak dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier PFP, tetap dilakukan koordinasi baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/beasiswa yang dapat diikuti oleh para PFP, dan konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti Mailinglist, What'sApp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang datang menemui para pejabat pelaksana pembinaan JFP guna mengkonsultasikan permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok

penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengkonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembinaan JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antar para PFP.

Kegiatan pembinaan tersebut di atas juga dilengkapi dengan pelaksanaan 4 (empat) kali studi banding ke instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) lainnya, yaitu Perencana (BAPPENAS), Peneliti (LIPI), Widyaiswara dan Analisis Kebijakan (LAN). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan berbagai kegiatan dan mekanisme pembinaan JFT untuk meningkatkan kualitas pembinaan JFP.

Hasil studi banding disampaikan dalam sebuah laporan yang menunjukkan bahwa struktur organisasi, jumlah SDM, dan jumlah anggaran sangat mempengaruhi kualitas pembinaan JFT. Pada keempat instansi pembina yang dikunjungi sebagaimana tersebut di atas, unit pelaksana pembinaan JFT adalah setingkat eselon II dengan jumlah SDM yang memadai dan anggaran yang besar. Dengan demikian, dapat dilakukan banyak kegiatan pembinaan yang melibatkan baik para Pejabat Fungsional maupun para pemangku kepentingan pada instansi penggunanya. Berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan, di antaranya adalah diklat fungsional dan teknis, bimbingan teknis tim penilai, sosialisasi kepada berbagai instansi pemerintah, dan pengembangan program pembinaan lainnya.

Dengan telah terlaksananya pembinaan terhadap 151 pejabat fungsional penerjemah, maka capaian yang diharapkan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

5. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika dan intensitas kegiatan pemerintahan Kabinet Kerja saat ini demikian tinggi dan membutuhkan dukungan penyebarluasan informasi yang cepat dan tepat. Upaya penyebarluasan informasi ini merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan agar setiap kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dapat diinformasikan melalui media yang dimiliki.

Penyebarluasan informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet saat ini telah dilakukan melalui sarana media *online* dan media sosial yang dikelola di Sekretariat Kabinet. Pada periode yang lalu, belum menentukan dan memikirkan sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat pembaca media

online dan media sosial terhadap penyebaran informasi yang dilakukan selama ini.

Karena itu penting bagi institusi mengetahui dan memahami respon masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. Demikian pula terhadap upaya penyebaran informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan melalui sarana *website* Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan respon dari masyarakat terkait dengan penyiapan berbagai informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet baik melalui media *online* maupun media sosial.

Kerangka yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dalam penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet adalah sejauhmana masyarakat mendapatkan kepuasan dan manfaat terhadap informasi melalui *website* Sekretariat Kabinet dan media sosial.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pemanfaatan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta kebijakan pemerintah dan capaian pembangunan yang disebarluaskan. Untuk mengukur pemanfaatan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta kebijakan pemerintah dan capaian pembangunan yang disebarluaskan pada akhir tahun 2015, dilakukan melalui survei kepada peserta Sidang Kabinet terkait dengan kepuasan terhadap informasi yang disajikan pada laman www.setkab.go.id. Dari 36 peserta, 31 orang menyatakan puas atau realisasinya sebesar 86,11% dari target yang diinginkan sebesar 80%, sehingga persentase capaiannya diperoleh sebesar 107,63%.

B. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014

Total anggaran Deputy Bidang Persidangan Kabinet tahun 2015 setelah revisi sebesar Rp10.096.902.000,- (sepuluh miliar sembilan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah terserap sebesar Rp9.497.279.051,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) atau sebesar 94,12%, dengan rincian penyerapan untuk masing-masing sasaran program sebagai berikut:

1. Sasaran Program “**Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sidang kabinet dan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet**”, memperoleh pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.9.522.360.000,- (sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan terserap sebesar Rp.8.901.365.174,- (delapan miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus

enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 93,48%

2. Sasaran program “**Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan naskah dan penerjemahan**”, memperoleh pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.574.542.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan terserap sebesar Rp.539.363.927,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,87%.

Pencapaian terhadap target sasaran dan anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang telah dicapai selama tahun 2015 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya dan hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Berdasarkan uraian capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa walaupun realisasi *output* penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan tahun 2015 melebihi dari target yang ditetapkan, namun dari sisi kinerja (*outcome*) mengalami penurunan. Capaian kinerja tahun 2015 atas kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet mencapai 92,17% dan kepuasan terhadap risalah sidang kabinet mencapai 91,55%. Sedangkan kepuasan kinerja terhadap naskah dan terjemahan dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti dan Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana mencapai 100% dan kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet mencapai 86,11%.

Jika disejajarkan antara capaian kinerja tingkat kepuasan dengan rentang nilai kepuasan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2015-2019, maka kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 termasuk dalam kategori **“sangat baik”** atau **nilai “A”**.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang telah diberikan kepada para peserta sidang belum sepenuhnya memenuhi kehendak peserta sidang namun secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Begitupun halnya dengan risalah sidang kabinet yang disusun dan disampaikan kepada para peserta sidang kabinet yang saat ini belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada peserta sidang, namun telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar kepada para peserta sidang khususnya dalam hal pemanfaatan risalah sidang kabinet dalam menindaklanjuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Presiden.

B. Langkah-langkah/rekomendasi perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merupakan kontribusi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet yang telah menunjukkan komitmen penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, walaupun pada pelaksanaannya dihadapi permasalahan seputar keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung kegiatan lainnya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet, diperlukan upaya-upaya nyata dan konprehensif guna mengatasi kekurangan-kekurangan yang masih ada sampai saat ini. Adanya berbagai tanggapan dan masukan dari para peserta sidang kabinet menjadi bagian penting untuk terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet dimasa yang akan datang.

Langkah-langkah perbaikan guna menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif lagi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kementerian/Lembaga dan instansi terkait dengan penyampaian informasi tentang jadwal dan tempat penyelenggaraan sidang dan bahan-bahan sidang;
2. Meningkatkan kualitas dan variasi jenis jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang;
3. Meningkatkan perlengkapan/peralatan yang telah ada saat ini dengan mengganti perlengkapan/peralatan yang lama dengan yang lebih modern dan berkualitas seperti; alat rekam baik audio maupun visual; penayang paparan yang lebih berkualitas; dan sebagainya
4. Mengusulkan tambahan pegawai khususnya pegawai yang handal dalam menyusun risalah sidang kabinet secara lebih akurat agar risalah yang dihasilkan lebih berkualitas; dan
5. Mempercepat penggandaan, penjilidan, dan pendistribusian risalah sidang kabinet kepada para peserta sidang sehingga risalah sidang kabinet dapat diterima tepat waktu.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kecepatan, ketelitian, dan keakuratan dalam penyiapan naskah kepresidenan/kenegaraan, meningkatkan kualitas terjemahan serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah agar dapat dihasilkan penerjemah yang andal bagi instansi pengguna.
7. Mengintensifkan penggunaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi seperti *e-mail* maupun grup sosial dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet melalui *website* dan media sosial Sekretariat Kabinet.